

LAPORAN KINERJA

Biro Hukum dan Komunikasi

2021

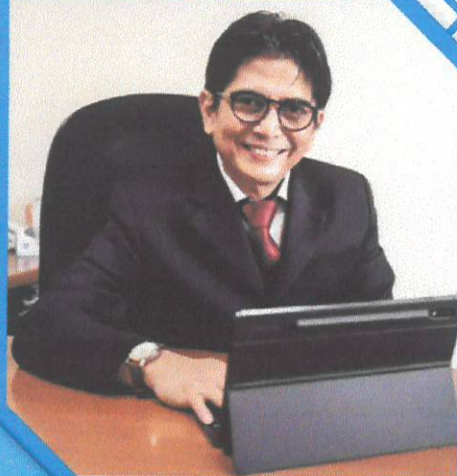
LAP-1134/SU04/3/2021
Tanggal 30 Desember 2021

Revisi 1: 2 Februari 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.



Dengan mengusung *tagline Protection and Branding*, Biro Hukum dan Komunikasi telah dan selalu siap mendukung tugas-tugas pengawasan secara *mutually non-exclusive* sebagaimana diamanatkan dalam Agenda Prioritas Pengawasan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pendorong bagi *stakeholders* internal dan eksternal

kami, agar tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik.

Kepala Biro

Eri Satriana



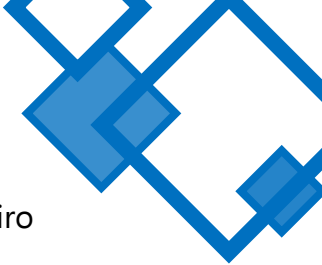
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Biro Hukum dan Komunikasi memiliki **empat** sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan **empat** indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengukur kinerja Biro. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, **tiga** indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan, sedangkan satu indikator kinerja walaupun tidak memenuhi target, namun capaiannya dapat dikatakan sangat baik.

Target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan tahun 2021 Biro Hukum dan Komunikasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2021

| Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Kinerja Kegiatan | | | |
|---|---|------------------|--------|-----------|-------------|
| | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan | 1 Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB | Skala 1-5 | 3,15 | 4,44 | 140,95 |
| 2 Meningkatkan Reputasi BPKP | 1 Indeks Reputasi BPKP | Skala 1-100 | 72 | 73,35 | 101,88 |
| 3 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP | 1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan | Skala 1-100 | 70 | 96,3 | 137,57 |
| 4 Meningkatkan kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi | 1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi | Skala 1-10 | 8,69 | 8,36 | 96,20 |



Adapun uraian dan analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” diukur dari satu IKK, yaitu “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” dengan target nilai tahun 2021 sebesar 3,15.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kualitas reformasi birokrasi BPKP Tahun 2020, diketahui bahwa penilaian peraturan perundang-undangan pada Indeks RB sebesar 4,44. Dengan demikian, kinerja pada kegiatan ini mencapai 140,95%.

SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA REPUTASI BPKP

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi berpesan bahwa tugas, fungsi, dan layanan dari pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga telah diterima oleh penggunanya, “tidak hanya *sent*, tapi juga *delivered*”. Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan berbeda, Presiden juga berpesan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib membangun reputasi pemerintah, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, BPKP terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk hadir dan memberikan manfaat kepada publiknya. Atas upaya tersebut, tentu BPKP perlu mengukur bagaimana penilaian dari publiknya, untuk memastikan tidak ada *gap* antara persepsi dan ekspektasi publik terhadap BPKP, atau disebut dengan pengelolaan reputasi. Sebagai bagian dari pengelolaan reputasi yang dilakukan oleh BPKP, BPKP telah membangun Indeks Reputasi BPKP. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi publik BPKP, atau disebut dengan masyarakat reputasi BPKP. Atas pengelolaan hubungan yang dilakukan BPKP dengan masyarakat reputasinya, BPKP telah menetapkan indikator-indikator pada setiap tahapan, yaitu tahapan *inputs*, *outputs*, *outtakes*, dan *outcomes*.

Indeks Reputasi BPKP merupakan alat ukur pada tingkatan *outcomes*, yaitu penilaian yang diberikan oleh masyarakat reputasi BPKP atas upaya pengelolaan hubungan

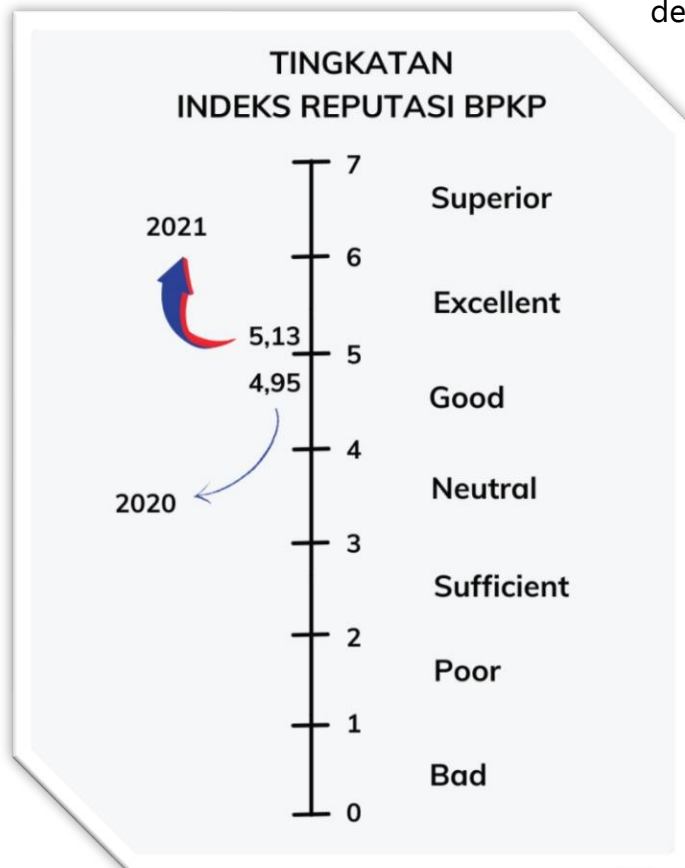
yang telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survei kepada masyarakat sasaran (masyarakat reputasi BPKP), yang terbagi menjadi masyarakat umum, media massa, kelompok atau organisasi masyarakat, dan mitra kerja BPKP. Model Indeks Reputasi BPKP memiliki empat aspek yang terdiri dari aspek Kualitas, Kinerja, Tanggung Jawab, dan Daya Tarik. Empat aspek tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 20 indikator variabel yang pada ujungnya dapat menggambarkan posisi tingkat Reputasi BPKP, yang dinilai dari skala 1 sampai

dengan 7 dengan gradasi kualitas reputasi sebagai berikut: 1. *Bad* – 2.

Poor – 3. *Sufficient* – 4. *Neutral* – 5. *Good* – 6. *Excellent* – 7. *Superior*.

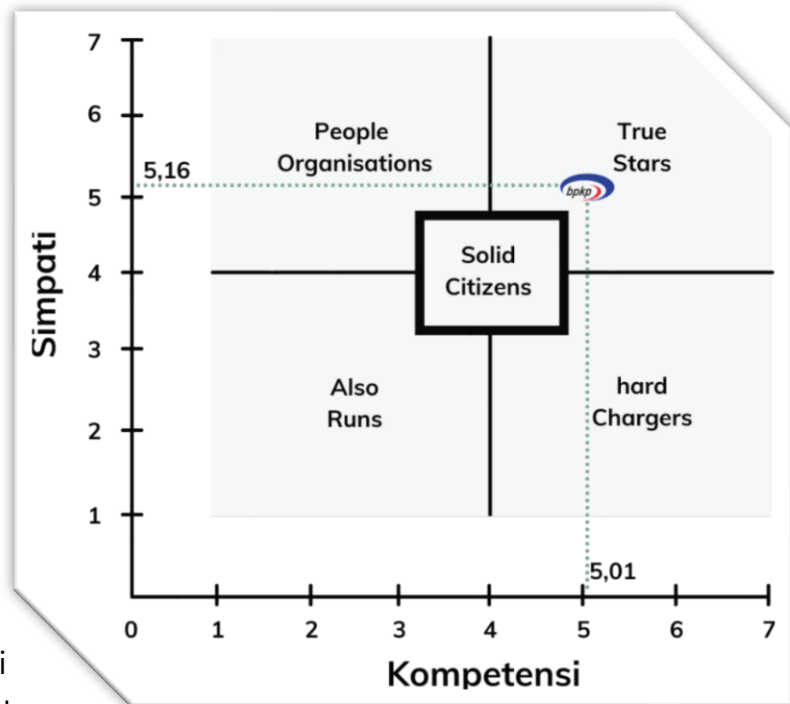
Pada tahun 2021, target Indeks Reputasi BPKP adalah 72 dari skala 100 atau 5,04 dari skala 7.

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh 3.053 responden atas 20 pernyataan survei yang dibangun merujuk pada konstruksi 4 variabel, diperoleh hasil Indeks Reputasi BPKP Tahun 2021 sebesar 5,13 dari maksimal 7, atau dalam skala 1 – 100, Indeks Reputasi BPKP tahun 2021 adalah 73,35. Merujuk pada nilai Indeks Reputasi BPKP tersebut maka BPKP berada pada



kategori "*Excellent*", naik dari penilaian tahun 2020 yaitu 4,95 (71 dalam skala 100) yang berada pada kategori "*Good*".

Analisis atas penilaian dari Masyarakat Reputasi BPKP juga dapat diukur melalui pemetaan reputasi, dengan mengukur posisi BPKP dalam dua variabel yaitu kompetensi dan simpati. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka BPKP berada di posisi "True Stars". Posisi ini menunjukkan bahwa BPKP telah dinilai oleh Masyarakat Reputasi menjadi organisasi yang telah difokuskan tidak hanya pada pencapaian kinerjanya saja tetapi juga diimbangi dengan terus mempromosikan nilai-nilai humanis dalam aktivitas yang dilakukan.



SASARAN KEGIATAN 3: PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERSELESAIKAN

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP, dengan realisasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum.

Permintaan pendapat hukum tahun 2021 sebanyak 51 pendapat hukum dan dapat dipenuhi sebanyak 50 pendapat hukum atau 92,6%.

2. Berkas Perkara di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berkas yang harus disampaikan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 91 berkas perkara dan dapat dipenuhi sebanyak 91 berkas perkara atau 100%.

Maka, realisasi **kinerja** Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan Tahun 2021 yaitu 96,3% **((92,6% + 100%)/2)**.

SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

Sasaran Kegiatan "Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi" diukur dari satu IKK, yaitu "Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi" dengan target nilai tahun 2021 sebesar 8,69. Pelaksanaan survei Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2021 dilakukan pada periode Desember 2021 yang berasal dari tiap unit kerja BPKP. Guna mengetahui bagaimana publik internal BPKP menilai kepuasan terhadap pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi, survei telah dilaksanakan dengan responden sejumlah 352 publik internal BPKP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Sebaran Responden Menurut Usia

| No | Kategori Usia | Jumlah | Persentase |
|------------------------|---------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20-30 Tahun | 49 | 13,92% |
| 2 | 31-40 Tahun | 73 | 20,74% |
| 3 | 41-50 Tahun | 90 | 25,57% |
| 4 | 51-60 Tahun | 140 | 39,77% |
| Total Responden | | 352 | 100% |

Jika dilihat dari Tabel 2 mengenai sebaran responden menurut usia, maka responden paling banyak menjawab berada pada rentang usia 51-60 Tahun yaitu sebesar 140 responden atau 39,77%. Sedangkan paling sedikit menjawab berada pada rentang usia 20-30 Tahun yaitu sebesar 49 responden atau 13,92%.

Tabel 3
Sebaran Responden Menurut Jabatan

| No | Kategori Usia | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Direktur | 15 | 4,26% |
| 2 | Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat | 5 | 1,42% |
| 5 | Kepala Perwakilan | 23 | 6,53% |
| 6 | Kabag TU | 28 | 7,95% |
| 7 | Korwas Bidang Pelaporan, Korwas P3A | 30 | 8,52% |

| No | Kategori Usia | Jumlah | Persentase |
|------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Korwas PAEP | 3 | 0,85% |
| 10 | Kasubbag TU, Subkoor TUP | 12 | 3,40% |
| 12 | Pegawai | 236 | 67,04% |
| Total Responden | | 352 | 100,00% |

Jika dilihat dari Tabel 3 mengenai sebaran responden menurut jabatan, maka responden paling banyak menjawab berada pada posisi pegawai yaitu 236 responden atau 67,04%. Sedangkan responden yang paling sedikit menjawab berada pada posisi jabatan Korwas PAEP yaitu 3 responden atau 0,85%.

Berdasarkan Survei Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi yang telah dilaksanakan dengan skala likert 1-10, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Survei

| No | Unsur | Indikator | | Nilai (Skala 1-10) |
|----|---|-----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| I | Kualitas/mutu layanan yang berorientasi hasil | 1 | Aktivitas Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam hal penyiapan bahan analisis, perancangan, penyusunan, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian/kontrak/ nota kesepahaman, telah sesuai dengan harapan anda | 8,33 |
| | | 2 | Aktivitas Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum dalam hal penyiapan pembinaan dan pelayanan penelaahan dan pemberian pendapat hukum, pemberian konsultasi dan bantuan hukum, serta penyuluhan hukum, telah sesuai dengan harapan anda? | 8,37 |

| No | Unsur | Indikator | | Nilai (Skala 1-10) |
|-----|----------------------|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | 3 | Aktivitas Bagian Komunikasi dan Informasi dalam mengelola reputasi BPKP dalam hal menginformasikan kinerja BPKP, Menangani isu-isu nasional yang terkait dengan BPKP dan APIP dari sisi komunikasi serta Mengedukasi masyarakat / publik terkait BPKP dan pengawasan internal pemerintah, telah sesuai dengan harapan anda? | 8,31 |
| II | Ketepatan waktu | 4 | Pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi dilaksanakan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien | 8,37 |
| | | 5 | Pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi dilakukan berdasarkan standar waktu yang telah ditentukan? | 8,33 |
| III | Integritas Pelayanan | 6 | Dalam melakukan pelayanan, Biro Hukum dan Komunikasi mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas dan menghindari perilaku KKN? | 8,58 |
| | | 7 | Dalam melakukan pelayanan, Biro Hukum dan Komunikasi tidak pernah memungut biaya atau mengharapkan feedback keuntungan ekonomi? | 8,74 |
| IV | Penanganan Pengaduan | 8 | Apabila terdapat pengaduan, Biro Hukum dan Komunikasi melaksanakan prosedur tanggapan dengan respon yang cepat, tepat dan jelas? | 8,40 |
| V | Sarana dan prasarana | 9 | Penataan ruang dan kebersihan ruang kantor Biro Hukum dan Komunikasi memudahkan anda untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan? | 8,25 |
| | | 10 | Anda merasa puas dan nyaman dengan kebersihan dan keamanan ruang kantor Biro Hukum dan Komunikasi? | 8,29 |

| No | Unsur | Indikator | | Nilai (Skala 1-10) |
|------|--------------------|-----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| VI | Prosedur | 11 | Anda merasa puas dalam melakukan koordinasi terkait layanan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan berdasarkan SOP? | 8,32 |
| | | 12 | Anda merasa puas dalam melakukan koordinasi terkait layanan penelaahan dan bantuan hukum yang telah dilakukan berdasarkan SOP? | 8,35 |
| | | 13 | Anda merasa puas dalam melakukan koordinasi terkait publikasi/kegiatan dan layanan informasi yang telah dilakukan berdasarkan SOP? | 8,34 |
| VII | Etika pelayanan | 14 | Anda merasa puas terhadap Pelayanan Petugas dalam hal: Sopan dalam melayani, keramahan petugas dan inisiatif dalam membantu? | 8,42 |
| | | 15 | Anda merasa puas terhadap pelayanan Petugas dalam hal layanan Biro Hukum dan Komunikasi secara keseluruhan untuk mendukung kelancaran tugas/kegiatan? | 8,40 |
| VIII | Kompetensi petugas | 16 | Petugas pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup dalam memberikan pelayanan yang diminta? | 8,40 |
| | | 17 | Petugas pelayanan Biro Hukum dan Komunikasi memberikan masukan/saran dan rekomendasi? | 8,41 |
| IX | Metode pelayanan | 18 | Layanan Biro Hukum dan Komunikasi secara mudah didapat/dijangkau baik secara langsung maupun secara tidak langsung (layanan daring, media percakapan berbasis internet)? | 8,32 |
| X | Inovasi | 19 | Seberapa puas Anda terhadap pemanfaatan inovasi layanan Biro Hukum dan Komunikasi pada Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) | 8,20 |

| No | Unsur | Indikator | | Nilai (Skala 1-10) |
|------------------|-------|-----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | | di website BPKP dan intranet BPKP (warga.bpkp.go.id)? | |
| | | 20 | Seberapa puas Anda terhadap pemanfaatan inovasi layanan Biro Hukum dan Komunikasi yaitu Aplikasi E-PPID Mobile (tersedia juga di Playstore)? | 8,14 |
| Rata-rata | | | | 8,36 |

Nilai indeks layanan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2021 dengan nilai 8,36 masuk dalam kategori "setuju". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden telah merasa puas dengan layanan yang telah diberikan oleh Biro Hukum dan Komunikasi sepanjang tahun 2021.

Namun demikian, jika melihat target yang telah ditetapkan di tahun 2021 adalah sebesar 8,69. Terdapat sedikit *gap* capaian sebesar 0,33. Biro Hukum dan Komunikasi akan melakukan evaluasi terkait hasil survei ini untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi di tahun 2022.

CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Output Kegiatan sesuai dengan RKA Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2021 sebanyak tiga indikator output kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Output Kegiatan Tahun 2021

| No | Indikator Output Kegiatan (IOK) RKA/DIPA | Satuan | Output 2021 | | |
|----|--|----------|-------------|-----------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan | Kegiatan | 15 | 15 | 100 |

| No | Indikator Output Kegiatan (IOK) RKA/DIPA | Satuan | Output 2021 | | |
|----|--|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum | Laporan | 30 | 30 | 100 |
| 3 | Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan | Dokumen | 101 | 141 | 142,2 |
| 4 | Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | Laporan | 31 | 31 | 100 |

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IOK 1 "Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan" diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Realisasi sebanyak 15 Kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional I;
- b) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional II;
- c) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP I;
- d) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP II;
- e) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP I;
- f) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP II;
- g) Penyusunan analisis Pembahasan Perjanjian/Kontrak/MoU I;
- h) Penyusunan analisis Pembahasan Perjanjian/Kontrak/MoU II;
- i) Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan I;
- j) Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan II;
- k) Penyusunan Himpunan Peraturan BPKP Tahun 2020;
- l) Harmonisasi dan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan;
- m) Penyusunan Analisis dan Deskripsi Peraturan Perundang-undangan I;
- n) Penyusunan Analisis dan Deskripsi Peraturan Perundang-undangan II; dan

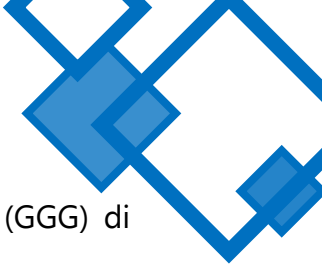



o) Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengawasan.

2. IOK 2 “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan.

Realisasi sebanyak 30 Kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Pendapat Hukum atas Permasalahan di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat.
- b) Pendapat Hukum terkait Penunjukan BPKP sebagai Tim Penilai dalam Komite Penilaian dan Notifikasi Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi.
- c) Pendapat atas Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur *Food Estate* Kalimantan Tengah dan Kawasan Industri Subang.
- d) Pendapat Hukum atas Pengelolaan Aset KKP dan Perum Perindo di 6 (enam) Pelabuhan Perikanan.
- e) Pendapat Hukum atas Permasalahan *Joint Venture Agreement* antara PT Krakatau Steel dan POSCO.
- f) Pendapat Hukum atas Hasil Reviu Tunggakan Kegiatan Pemeliharaan Helikopter yang Belum Terbayarkan pada BASARNAS.
- g) Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 73/G/2018/PTUN.MKS pada tingkat Peninjauan Kembali.
- h) Penanganan Sengketa Permohonan Informasi Publik Nomor 005/I/KIP-PS/2019 pada tingkat Kasasi.
- i) Pendampingan atas Permohonan/Nota Keberatan dari Kuasa Hukum PT Riskaindo Jaya terkait audit bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- j) Pendapat Hukum atas Kegiatan Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah (Satgas AKD) Provinsi Banten Tahun 2020 terkait *Current Issues* Kegiatan Satgas AKD Provinsi Banten.
- k) Pendapat Hukum terkait Akta Perdamaian.

- 
- l) Kajian atas Pengembangan dan Implementasi *Good Government* (GGG) di Kementerian/Lembaga/Daerah.
 - m) Pendapat Hukum atas Bunga Giro Tambahan Dana PMN PT BPUI.
 - n) Pendapat Hukum atas Informasi Permohonan Pertukaran Tanah di Jalan Petra Karang Panjang Ambon dari Keluarga Souripet (Pemohon) kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.
 - o) Penanganan Perkara Gugatan Perdata Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang.
 - p) Pemberian Konsultasi Hukum terkait Adanya Surat dari Kuasa Hukum Eks Kepala Pusfatekgan LAPAN (Tersangka Kasus Tipikor) yang Meminta Penjelasan terkait Hasil Reviu Kerjasama Swakelola LAPAN – BIG.
 - q) Pendampingan Pemeriksaan Tim Audit BPKP Provinsi Maluku sebagai Saksi di Polda Maluku.
 - r) Pendampingan Pemeriksaan Tim Audit BPKP di Pengadilan Tipikor dalam Perkara Dugaan Tipikor Pengadaan BCSS Bakamla.
 - s) Pemberian Konsultasi Hukum atas Surat dari Lokataru yang Meminta Informasi untuk Digunakan dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
 - t) Pendapat atas Konsep Saran dan Masukan Proses Pembebasan Lahan Redislokasi Makorem 132/Tdl.
 - u) Pendapat Hukum terkait Estimasi Persetujuan Klaim Asuransi BMN BPKP dari Konsorsium Asuransi BMN.
 - v) Pendapat Hukum atas Rancangan Pernyataan Asumsi Kualifikasi (*Disclaimer*) dalam Penyusunan Notula/Risalah Hasil Ekspose.
 - w) Kajian terkait Pemberian Setifikat bagi Kepala SPI BUMN.
 - x) Penanganan perkara gugatan perdata Nomor Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Ksp di PN Kualasimpang.
 - y) Penanganan gugatan perkara Pra Peradilan Nomor Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN.Srl di PN di Sarolangun.
 - z) Pemberian Konsultasi Hukum terkait Tanggapan atas Permohonan Banding Administratif dari kantor advokat & konsultan hukum EMIL SIAIN, SH & REKAN selaku kuasa hukum Aryanto Pramet (Direktur PT. Sinta Agro Mandiri).

- 
- aa) Pendapat Hukum terkait Permintaan Data Kepada Pusinfowas oleh Ernest & Young.
 - bb) Pendapat Hukum terkait Pemberlakuan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BPJPDA).
 - cc) Penanganan perkara gugatan perdata Nomor 264/Pdt.G/2020/PN.JKT,PST PN Jakarta Pusat, dan
 - dd) Penanganan perkara gugatan perdata Nomor 133/Pdt.G/2020/PN/Jap di PN Jayapura.
3. IOK 3 "Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan" diukur dari jumlah **dokumen** permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan oleh pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP.
- Realisasi sebanyak 141 kegiatan atau mencapai **141%** dari target yang telah ditetapkan (**101 dokumen**) dengan rincian realisasi sebagai berikut:
- a) Pendapat Hukum
Permintaan Pendapat Hukum Tahun 2021 sebanyak 54 Pendapat Hukum. Dapat dipenuhi sebanyak 50 Pendapat Hukum atau 92,6%.
 - b) Berkas Perkara di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berkas yang harus disampaikan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara: 91 Berkas Perkara, dapat dipenuhi sebanyak 91 perkara atau mencapai 100%.
4. IOK 4 "Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi" diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan.
- Realisasi sebanyak 31 Kegiatan atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian realisasi sebagai berikut:
- a) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Januari 2021
 - b) Laporan Monitoring *Website* Bulan Januari 2021
 - c) Laporan Layanan Informasi Bulan Januari 2021
 - d) Laporan Layanan Informasi Bulan Februari 2021
 - e) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Februari 2021
 - f) Laporan Monitoring *Website* Bulan Februari 2021
 - g) Laporan Monitoring *Daily News* Bulan Januari 2021
 - h) Laporan Monitoring *Daily News* Bulan Februari 2021

- 
- i) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Maret 2021
 - j) Laporan Monitoring *Website* Bulan Maret 2021
 - k) Laporan Layanan Informasi Bulan Maret 2021
 - l) Laporan Layanan Informasi Bulan April 2021
 - m) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan April 2021
 - n) Laporan Monitoring *Website* Bulan April 2021
 - o) Laporan Monitoring *Daily News* Bulan Maret 2021
 - p) Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan I
 - q) Laporan Monitoring *Daily News* Bulan April 2021
 - r) Laporan Monitoring *Daily News* Bulan Mei 2021
 - s) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Mei 2021
 - t) Laporan Monitoring *Website* Bulan Mei 2021
 - u) Laporan Layanan Informasi Bulan Mei 2021
 - v) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Juni 2021
 - w) Laporan Monitoring *Website* Bulan Juni 2021
 - x) Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan II
 - y) Laporan Monitoring Layanan Informasi Bulan Juni 2021
 - z) Laporan Monitoring *Daily News* Bulan Juni 2021
 - aa) Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan III
 - bb) Laporan Monitoring Media Sosial Bulan Juli 2021
 - cc) Laporan Monitoring *Website* Bulan Juli 2021
 - dd) Laporan Monitoring Layanan Informasi Bulan Juli 2021
 - ee) Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan IV

PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Penggunaan Dana

Penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2021 disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Penggunaan Dana tahun 2021

| No | Indikator Output Kegiatan (IOK) | Anggaran dan Realisasi Dana (Rp) | | |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------|
| | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan | 408.003.000 | 404.401.899 | 99,12 |
| 2 | Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum | 751.015.000 | 735.295.570 | 97,90 |
| 3 | Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan | | | |
| 4 | Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 829.800.000 | 829.137.370 | 99,92 |
| Jumlah | | 1.988.818.000 | 1.968.834.839 | 99,00 |

Realisasi anggaran Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.883.659.558 atau 99,74% dari target. Kinerja keuangan ini sangat baik.

2. Penggunaan SDM

Realisasi penggunaan SDM untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2021 disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Penggunaan SDM Tahun 2021

| No | Indikator Output Kegiatan (IOK) | Anggaran dan Realisasi SDM (OH) | | |
|----|--|---------------------------------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan | 1.896 | 1.898 | 100,11 |
| 2 | Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum | 2.259 | 2.256 | 99,87 |
| 3 | Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan | | | |

| No | Indikator Output Kegiatan (IOK) | Anggaran dan Realisasi SDM (OH) | | |
|----|--|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 2.495 | 2.622 | 105,09 |
| | Jumlah | 6.650 | 6.776 | 101,89 |

KINERJA LAINNYA

Selain kinerja yang telah diuraikan di atas, dalam periode tahun 2021 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan-penghargaan baik dari pihak eksternal dan internal, yaitu:

1. Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan predikat "Informatif" dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).



2. *Silver Winner* Kategori *Owned Media* Lembaga Sub Kategori *e-Magazine* PR Indonesia *Award* 2021 dari PR Indonesia.

3. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id) dari Kementerian Hukum dan HAM.
4. Predikat Terbaik untuk Kategori Pengelolaan Disiplin Pegawai dalam Forum Kepegawaian Tahun 2021 dari Biro Sumber Daya Manusia.